



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 116 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 243 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Analisis Jabatan

#### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Analisis Beban Kerja

#### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

## BAB III

## KEGUNAAN

## Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat; dan
  - d. Biro ORB.

## BAB IV

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.



- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2016

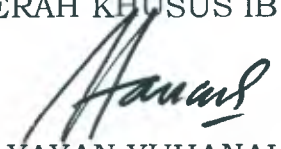
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62087

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Nomor 116 TAHUN 2016  
Tanggal 13 Mei 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	Kepala Badan	1					
2	Sekretaris Badan		1				
	a. Kepala Subbagian Umum			1			
	1) Pengurus Barang				2		
	2) Penyimpan Barang				2		
	3) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	4) Pengadministrasi Umum				4		
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1			
	1) Pengelola Kepegawaian				2		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	c. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendaharawan				2		
	2) Pengolah Data Keuangan				1		
	3) Verifikator				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				2		
	d. Kasubbag Perencanaan dan Anggaran			1			
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				2		
	2) Pengadministrasi Program dan Anggaran				2		
3	Kepala Bidang Perpustakaan		1				
	a. Kepala Subbidang Pelayanan Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Pelayanan Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Pelayanan Perpustakaan (Gd. Perpustakaan Cikini, Gd. Perpustakaan Nyi Ageng Serang, Gd. Pulomas)				30		
	3) Penyiap Layanan Perpustakaan				2		
	b. Kepala Subbidang Pengolahan			1			
	1) Pengelola Bahan Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Bahan Perpustakaan				2		
	3) Penyiap Bahan Perpustakaan				1		
	c. Kepala Subbidang Deposit			1			
	1) Pengelola Deposit				1		
	2) Pengadministrasi Deposit				1		
4	Kepala Subbidang Kearsipan		1				
	a. Kepala Subbidang Pelayanan Kearsipan			1			



No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
	1) Pengelola Pelayanan Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Pelayanan Kearsipan				2		
	3) Penyiap Pelayanan Kearsipan				1		
	b. Kepala Subbidang Pelestarian			1			
	1) Pengelola Pelestarian				1		
	2) Pengadministrasi Pelestarian				5		
	3) Penyiap Pelestarian				1		
	c. Kepala Subbidang Akuisisi			1			
	1) Penyiap Dokumentasi, Data dan Laporan				1		
	2) Pengadministrasi Dokumentasi, Data dan Laporan				4		
	3) Penyiap Dokumentasi, Data dan Laporan				1		
5	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan		1				
	a. Kepala Subbidang Pembinaan Kearsipan			1			
	1) Pengelola Pembina Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Pembina Kearsipan				2		
	b. Kepala Subbidang Pembinaan Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Pembinaan Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Pembinaan Perpustakaan				2		
	c. Kepala Subbidang Pemasyarakatan			1			
	1) Pengelola Publikasi dan Informasi Pemasyarakatan Perpustakaan dan Kearsipan				6		
	2) Pengadministrasi Publikasi dan Informasi Pemasyarakatan Perpustakaan dan Kearsipan				2		
6	Kepala Bidang Pengembangan dan Sistem Informasi		1				
	a. Kepala Subbidang Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan			1			
	1) Analis Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan				2		
	2) Pengadministrasi Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan				2		
	b. Kepala Subbidang Sarana Perpustakaan dan Kearsipan			1			
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana Perpustakaan dan Kearsipan				2		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana Perpustakaan dan Kearsipan				2		
	c. Kepala Subbidang Sistem Informasi			1			
	1) Pengelola Sistem Informasi				6		
	2) Pengadministrasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan				2		
7	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	4) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Subbidang Pelayanan Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Perpustakaan				1		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
	2) Pengadministrasi Perpustakaan				10		
	3) Pelayanan Perpustakaan				2		
	c. Kepala Subbidang Koleksi Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Koleksi Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Dokumentasi				2		
	3) Penyiap Dokumentasi				1		
	d. Kepala Subbidang Kearsipan			1			
	1) Pengelola Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Kearsipan				2		
	3) Penyiap Kearsipan				2		
8	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Utara		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	4) Penyiap Berkas				1		
	b. Kepala Subbidang Pelayanan Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Perpustakaan				10		
	3) Penyiap Perpustakaan				2		
	c. Kepala Subbidang Koleksi Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Koleksi Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Dokumentasi				2		
	d. Kepala Subbidang Kearsipan			1			
	1) Pengelola Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Kearsipan				2		
9	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Barat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	4) Penyiap berkas				0		
	b. Kepala Subbidang Pelayanan Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Perpustakaan				10		
	3) Pelayanan Perpustakaan				1		
	c. Kepala Subbidang Koleksi Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Koleksi Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Dokumentasi				2		
	d. Kepala Subbidang Kearsipan			1			
	1) Pengelola Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Kearsipan				2		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
10	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	4) Penyiap berkas				1		
	b. Kepala Subbidang Pelayanan Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Perpustakaan				10		
	c. Kepala Subbidang Koleksi Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Koleksi Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Dokumentasi				2		
	d. Kepala Subbidang Kearsipan			1			
	1) Pengelola Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Kearsipan				2		
11	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Timur		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	b. Kepala Subbidang Pelayanan Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Perpustakaan				10		
	3) Pelayan Perpustakaan				1		
	c. Kepala Subbidang Koleksi Perpustakaan			1			
	1) Pengelola Koleksi Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Dokumentasi				2		
	3) Penyiap				1		
	d. Kepala Subbidang Kearsipan			1			
	1) Pengelola Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Kearsipan				2		
12	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendaharawan				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	b. Kepala Subbidang Perpustakaan			1			
	1) Pengolah Data Perpustakaan				1		
	2) Pengadministrasi Perpustakaan				10		
	c. Kepala Subbidang Kearsipan			1			
	1) Pengelola Kearsipan				1		

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
	2) Pengadministrasi Perpustakaan				10		
	c Kepala Subbidang Kearsipan			1			
	1) Pengelola Kearsipan				1		
	2) Pengadministrasi Kearsipan				2		
	3) Penyiap				1		
13	Sub Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis						
	a. Arsiparis Pelaksana					20	
	b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan					24	
	c. Arsiparis Penyelia					24	
	d. Arsiparis Pertama					27	
	e. Arsiparis Muda					22	
	f. Arsiparis Madya					17	
14	Sub Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan						
	a. Pustakawan Pertama					41	
	b. Pustakawan Muda					27	
	c. Pustakawan Madya					2	
	Jumlah	1	11	39	252	204	
	Jumlah Total			507			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA